

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Kealpaan

a. Pengertian Kealpaan

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Dalam *Memorie Van Toelichting* terdapat keterangan, bahwa kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan, di lain pihak dengan hal yang kebetulan. KUHP sendiri tidak ditemukan definisi tentang kealpaan, oleh karena itu, pengertian kealpaan harus dicari dalam ilmu pengetahuan hukum (doktrin) dan yurisprudensi. Baik doktrin maupun yurisprudensi pada prinsipnya merumuskan kealpaan sebagai kekurangan-pendugaan atau kurang hati-hatian.¹

Van Hamel mengartikan kealpaan sebagai berikut :²

- Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum
- Tidak mengadakan kehati-hatian seperti diharuskan oleh hukum.

¹ Masruchin Ruba'i **Op.Cit.**.. hal 58.

² Moeljatno, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hal 201.

Menurut Simons kealpaan adalah tidak adanya sikap kehati-hatian dan tidak menduga akibatnya. Kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah *culpa lata*, kurang hati-hatian yang cukup besar. ukuran untuk menentukan kealpaan demikian adalah orang pada umumnya. Kealpaan ringan (*culpa levis*) tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. ukuran kealpaan ringan adalah sikap hati-hatinya orang yang sangat cermat. Jadi, orang yang tidak berhati-hati sebagaimana orang yang sangat cermat berada dalam kealpaan ringan.³

Selain *culpa lata* dan *culpa levis*, juga terdapat tingkatan kealpaan, yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dalam kealpaan yang disadari, Si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah, tapi timbul juga masalah. Kealpaan yang tidak disadari adalah pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul.⁴

Dipidananya kealpaan yang tidak disadari merupakan salah satu masalah dari masalah-masalah hukum pidana. Tidak mudah mencari alasan apakah yang dapat dicelakakan kepada seseorang yang

³ **Ibid**, Hal 58

⁴ **Ibid**, hal 59.

menimbulkan suatu akibat tertentu, sedang tidak terpikir olehnya tentang kemungkinan akan terjadinya suatu akibat.⁵

Kesulitan karena kesalahan itu kecil sekali jika dibandingkan dengan akibat-akibatnya yang acapkali jauh lebih hebat yang ditimbulkan oleh kelakuan yang ada kesalahannya tersebut. seringkali tindak pidana culpa terjadi karena adanya unsur kealpaan pada diri korban. Dalam hal ini demikian berlaku prinsip kelapaan korban tidak dapat meniadakan kealpaan petindak.⁶

Adanya kealpaan harus ditentukan secara normative dan tidak secara fisik atau psikis. Yang memegang ukuran normative itu adalah hakim. Segala keadaan objektif dan yang menyangkut si petindak harus di teliti secara saksama. Untuk menentukan kurang hati-hatian dari petindak dapat digunakan ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain. Kewajiban ini dapat diambil dari undang-undang atau norma lain.⁷

Perumusan tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan tercantum dalam KUHP pasal 359 yang berbunyi “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.” Matinya orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan

⁵ Martiman Prodjohamidjoho, **Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1997. Hal 52.

⁶ Masruchin Ruba'i **Op.Cit**, hal 59.

⁷ **Ibid**

akibat dari pada kurang hati-hati atau kurang perhatian atau lalainya terdakwa.

Kealpaan dalam berlalu lintas, tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 :

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

b. Persamaan dan Perbedaan antara Kesengajaan dengan Kealpaan

1. Persamaan Kesengajaan dengan Kealpaan

Dikatakan bahwa kesengajaan dan kealpaan, kedua-duanya menunjuk kepada arah yang keliru dari kehendak atau perasaan.

Di Jerman akhir-akhir ini ada suatu usaha memikirkan tentang adanya kesamaan bentuk antara kesengajaan dan kealpaan yang dinamakan ajaran *Finale Handlung Lehre* menurut Welzel di dalam teori *Finale Handlung Lehre*, baik delik dolus yang dilakukan dengan sengaja maupun delik culpa yang dilakukan karena kealpaan adalah suatu perbuatan final.

2. Perbedaan Kesengajaan dengan Kealpaan

Perbedaan yang agak penting antara kesengajaan dan kealpaan yang disadari di satu pihak dengan kealpaan yang tidak disadari di lain pihak apabila kita perhatikan maka terlihatlah perbedaan lukisan mengenai keadaan jiwa masing-masing pembuat dari bentuk kesengajaan (mulai kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan dan kealpaan yang disadari sampai kepada kealpaan yang tidak disadari), faktor kehendak yang ada pada si pembuat mulai dari kehendak sebagai maksud sampai kepada kealpaan yang disadari keadaanya semakin melemah.⁸

2. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau

⁸ **Ibid**, hal 60.

bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

UU Kekuasaan Kehakiman pasal 50 adalah Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Ada dua jenis putusan dalam KUHAP, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan bila pemeriksaan suatu perkara telah selesai sampai dengan materi perkaranya, sedangkan putusan sela dijatuhkan bila suatu perkara diperiksa, tapi belum masuk materinya. Perbedaan dari keduanya terletak pada sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim.⁹

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, dapat disimpulkan dua macam sifat putusan, yaitu:

1. Putusan pemidanaan, yaitu putusan yang bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.
2. Putusan yang bukan pemidanaan, ada dua macam yaitu:
 - a. Putusan bebas dari segala dakwaan yaitu bila dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.

⁹ Andi Hamzah, **Op.Cit**, hal 277.

- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu bila dalam persidangan terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana karena dua alasan, yaitu; alasan pemaaf, bila tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang di luar kesadarannya, sehingga dimaafkan oleh hukum, yang diatur dalam pasal 44 KUHP, alasan pembenar yaitu bila tindak pidana yang dilakukan seseorang menyimpang dari ketentuan hukum akan tetapi berhubung perbuatannya dilakukan atas dasar keadaan memaksa, hal mana dapat dibenarkan oleh hakim (Pasal 49 KUHP) yaitu melakukan perbuatan pembelaan yang bersifat terpaksa terhadap diri, harta benda atau kehormatan karena ada serangan pihak lawan dan pembelaan melampaui batas pertahanan karena perasaan yang terguncang segera pada saat itu juga.

Putusan pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat 1 KUHP). Dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin terdakwa yang bersalah. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁰

Di dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Bilamana dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Semua putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum bila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹¹

Tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili. Yang dimaksud disini ialah yang termasuk peradilan umum, jadi pengadilan militer yang mempunyai yurisdiksi sendiri terhadap pelaku delik dari orang militer maupun kekecualian.¹²

Dalam hal kekuasaan mengadili, ada dua macam, yang biasa disebut juga kompetensi, yaitu sebagai berikut :

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*)

¹⁰ Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 86.

¹¹ **Ibid**, Hal 97.

¹² Andi Hamzah, **Op.Cit**, hal 107.

kepada suatu macam pengadilan (pengadilan negeri), bukan pada pengadilan lain.

2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) di antara satu macam (pengadilan-pengadilan negeri).¹³

3. Disparitas Pidana

Disparitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbedaan.¹⁴ Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam penelitian ini adalah kesenjangan rentan waktu pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁵

Dari batasan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana bukan hanya meliputi pemberian sanksi yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sejenis dengan alasan yang jelas, tetapi juga menyangkut tindak pidana yang patut dipersamakan.

Masalah penetapan sanksi merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan

¹³ **Ibid**, hal 109.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta 1989. Hal 209.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi. **Op Cit.**, hal 52.

tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.¹⁶ Penetapan sanksi yang pada hakekatnya merupakan kewenangan beberapa instansi, maka dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahapan pidana ini harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Konteks penerapan sanksi, “getaran-getaran” dalam hal ini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya disparitas pidana.¹⁷

Disparitas pidana memang tidak bisa diiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pidananya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesengajaan yang tidak adil.¹⁸ Apabila dilihat dari lamanya yang bisa bervariasi dari satu undang-undang ke undang-undang yang lain karena penetapan masa hukumannya yang berbeda untuk tindak pidana yang sama, maka hal itu dapat dipandang sebagai disparitas.¹⁹

Kemungkinan terjadinya disparitas dalam pemberian sanksi dalam praktek peradilan sehari-hari di Indonesia sangat besar. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan kebebasan yang luas kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Namun demikian kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya

¹⁶ M.Sholehuddin, **Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana**, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003, hal 115.

¹⁷ **Ibid**

¹⁸ **Ibid**, hal 115-116.

¹⁹ **Ibid**, dikutip dari **Crime and Criminology**, Sue Titus Reid, The Dryden Press Hindsale, Illionis, 1976, hal 372.

sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) yang dianut di Indonesia, dimana selain berdasarkan keyakinan hakim juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.²⁰ Adanya kebebasan yang sangat besar tersebut maka hakim diharapkan dapat menciptakan hukum, menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret sehingga peristiwa berikutnya dapat diselesaikan menurut kaidah yang telah diciptakan oleh hakim.

Disparitas pidana memang tidak bisa diiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang ppidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesengajaan yang tidak adil.²¹ Salah satu permasalahan dalam putusan hakim perkara pidana adalah disparitas ppidanaan (penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang relatif sama).²²

4. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Hakim sebelum memutus suatu perkara harus memperhatikan setiap hal-hal penting

²⁰ Sonny Jatmiko, Disparitas **Putusan Pengadilan dalam Perjudian Togel (Studi di Pengadilan Negeri Tulungagung)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2005, hal 26.

²¹ Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1977, hal 115-116.

²² Yusti Probawati Rahayu, **Op.Cit** . hal 13.

dalam persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seorang, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.²³

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan unsur subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan unsur objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.²⁴

Pertimbangan hakim ini terdiri atas dua yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan haruslah menimbulkan efek jera. Sedangkan, hal yang meringankan adalah setiap hal yang menjadi alasan hakim agar sanksi yang didakwakan oleh penuntut umum dapat dikurangi.²⁵

Di dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Bilamana dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Semua putusan

²³ Bambang Waluyo, 2004. **Pidana dan Pembedaan**. Jakarta, Sinar Grafika. hal 89.

²⁴ **Ibid.**

²⁵ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-PRESS, Jakarta, 2005, hal 10.

pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.²⁶

Kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman, dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman ataupun memilih jenis hukuman maka dapat ditegaskan disini bahwa alasan-alasan tersebut, baik ia jadikan landasan untuk memberatkan hukuman ataupun untuk meringankannya, tidak merupakan arti yang *essentieel* lagi.²⁷

Batas-batas hakim pidana tersebut adalah bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa secara tepat, suatu kebebasan tidak berarti kebebasan yang mutlak secara tidak terbatas. Seorang hakim harus mempertimbangkan sifat dan seriousness delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya, ia harus melihat kepribadian dari perilaku perbuatan, dengan umurnya, tingkatan pendidikan, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal yang lain.²⁸

²⁶ **Ibid**, Hal 97.

²⁷ Oemar Seno Adji, **Hukum Hakim Pidana**, Jakarta, Erlangga, 1984. hal 8.

²⁸ **Ibid**, Hal 9.